



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN



Kementerian PPN/
Bappenas



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



LKPP
Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



BKPM
BAGIAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



PENJAMINAN &
INFRASTRUKTUR
Guarantee & Infrastructure

KANTOR BERSAMA KPBU REPUBLIK INDONESIA

PPP Joint Office Government of Indonesia

KEGIATAN DI MINGGU KE EMPAT JANUARI 2020

RAPAT PEJABAT PIMPINAN TINGGI MADYA KANTOR BERSAMA KPBU RI

Informasi Internal Kantor Bersama KPBU



Pembahasan Nota Kesepahaman Bersama Kantor Bersama KPBU RI

24 Januari 2020

Kegiatan Rapat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kantor Bersama ini merupakan kelanjutan dari serangkaian roadshow yang telah dilakukan oleh tim legal Kantor Bersama untuk menyamakan suara dan pandangan para anggota Kantor Bersama dalam penguatan kelembagaan Kantor Bersama KPBU dalam penyusunan Nota Kesepahaman Bersama (MoU). Rancangan Nota Kesepahaman Bersama diharapkan dapat mengakomodir masukan dari para anggota Kantor Bersama dan telah didiskusikan dengan Biro Hukum dan Regulasi masing - masing anggota Kantor Bersama. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan anggota kantor bersama dan perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Pembahasan Nota Kesepahaman Bersama Kantor Bersama KPBU RI

Berikut ini adalah Pimpinan Kantor Bersama yang menghadiri rapat ini:

1. Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diwakilkan oleh Pak Bastary Pandji Indra selaku Asisten Deputi Perumahan Pertanahan dan Pembiayaan Infrastruktur, Kemenko Perekonomian.
2. Bapak Purbaya Yudhi Sadewa selaku Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Resiko dan Direktur PDPP, Kementerian Keuangan diwakilkan oleh Pak Farid Arif Wibowo selaku Kepala Subdirektorat Peraturan dan Pengembangan Kebijakan Pembiayaan Infrastruktur.
4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri diwakilkan oleh Direktur Perencanaan evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Bapak Budiono Subambang
5. Bapak Kennedy Simanjuntak selaku Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN / Bappenas
6. Bapak Ikmal Lukman selaku Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal
7. Bapak Salusra Widya selaku Deputi Pengembangan Strategi dan Kebijakan, LKPP
8. Bapak Muhammad Sutopo selaku Direktur Utama PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia
9. Direktur Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri diwakilkan oleh Bapak Sumule Tumbo selaku Kasubdit Pendapatan Daerah Wilayah III
10. Direktur SUPD II, Kementerian Dalam Negeri diwakilkan oleh Ibu Nyimas Dwi Koryati selaku Kasubdit Pekerjaan Umum
11. Bapak Sri Bagus Guritno selaku Direktur Kerjasama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, Kementerian PPN/Bappenas
12. Bapak Hely Satrya Putera selaku Direktur Perencanaan Infrastruktur, BKPM
13. Bapak Fendy Dharma Saputra selaku Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, LKPP

Rapat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya ini membahas mengenai kesepakatan dari isi MoU, konfirmasi keikutsertaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sebagai salah satu anggota Kantor Bersama KPBU RI, serta posisi keanggotaan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia dalam Kantor Bersama KPBU RI sebagai pihak yang akan bertandatangan di MoU.

Berikut ini beberapa poin - poin *highlight* dalam pembahasan Rapat Eselon I Kantor Bersama hari ini:

1. Diharapkan rencana kerja dan target kantor bersama telah rampung serta SOP dan target - target penyelesaian proyek telah dilengkapi sebelum dilakukannya penandatanganan MoU Kantor Bersama.
2. Kemenko Maritim dan Investasi setuju bergabung sebagai anggota Kantor Bersama KPBU RI dan menyetujui dengan peran yang diusulkan dalam MoU
3. Diusulkan sekretariat Kantor Bersama dipegang oleh Bappenas berikut alokasi penganggarannya.

Selain itu disampaikan pula beberapa masukan tentang pelaksanaan operasional Kantor Bersama kedepannya. Kantor Bersama kedepannya diharapkan dapat:

1. menjadi *champion* dan *dispute resolution* serta mampu berkoordinasi dengan para pihak investor dan mampu memberikan *guidance* dalam transfer aset pada saat proyek KPBU telah selesai masa konsesinya.
2. Kantor Bersama perlu mempunyai SK Tim Kantor Bersama bagi para anggotanya yang terlibat dalam operasional Kantor Bersama.
3. diharapkan kantor bersama dapat menjadi klinik dari sosialisasi KPBU di Indonesia

Dari rapat ini dapat disimpulkan beberapa poin sebagaimana yang tertera di bawah ini:

1. Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi menyetujui untuk bergabung sebagai anggota Kantor Bersama KPBU RI dan telah menyatakan kesanggupannya;
2. Disepakati Sekretariat Kantor Bersama berada di Bappenas beserta anggaran operasionalisasi sekretariat.
3. PT. PII akan terlibat aktif dalam Kantor Bersama KPBU RI namun bukan sebagai pihak penandatangan
4. akan disusun SOP, Target Penyelesaian Proyek dan Rencana Kerja Kantor Bersama sebagai bahan pendukung pada saat penandatanganan MoU